

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi setiap bangsa, tidak ada satupun negara di dunia ini yang bebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Suharto, 2009). Menurut Irawan (2010) faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu, laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, timpangnya distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya perhatian dari pemerintah dan kualitas sumberdaya alam masih rendah.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk yaitu pertama kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja, kedua kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan, ketiga kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar, keempat kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan (Tarigan, 2008).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2016) jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, dengan jumlah penduduk miskin Indonesia dari

tahun 2014 sampai 2015 meningkat sebesar 0,26 persen. Dimana pada tahun 2014 sebesar 27,73 juta orang menjadi 28,59 juta orang. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah sehingga tidak mampu menyerap angkatan kerja. Hal ini menyebabkan pengangguran meningkat, demikian pula dengan angka kemiskinan.

Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah penyumbang peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung (2016), jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 67,2 ribu orang meningkat menjadi 74,1 ribu orang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk miskin yang berbeda. Adapun jumlah penduduk miskin pada 7 kabupaten/kota dari Tahun 2010 sampai 2014 dirincikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Bangka	21,7	15,41	16,48	16,2	16,0
Belitung	15,9	11,29	12,09	14,3	12,7
Bangka Barat	9,2	6,53	6,93	6,2	6,1
Bangka Tengah	13,1	9,3	9,95	9,5	9,4
Bangka Selatan	10,7	7,6	8,13	7,5	7,4
Belitung Timur	11,1	7,88	8,46	7,9	7,9
Pangkalpinang	10,6	7,53	8,03	7,8	7,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata laju penduduk miskin Provinsi Bangka Belitung dalam kurun waktu 4 tahun yakni dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menurun sebesar 6,51 persen. Kota Pangkalpinang menyumbang penurunan laju penduduk miskin dimana tahun 2010 sampai 2011 menurun sebesar 28,96 persen, tahun 2011 sampai 2012 naik sebesar 6,64 persen, tahun 2012 sampai 2013 menurun lagi sebesar 2,86 persen dan tahun 2013 sampai 2014 tidak ada perubahan. Dengan demikian, rata-rata laju penduduk miskin Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu Tahun 2010 sampai Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 6,29 persen.

Kota Pangkalpinang terdiri dari beberapa kecamatan yakni kecamatan Rangkui, Bukit Intan, Girimaya, Pangkalbalam, Gabek, Taman Sari dan Gerunggang. Jumlah penduduk miskin di setiap kecamatan berbeda-beda. Ini dapat dilihat pada Tabel 2 mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin per kecamatan di Kota Pangkalpinang.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Persentase (%)
1.	Rangkui	37.719	6.470	17,15
2.	Bukit Intan	35.960	5.537	15,40
3.	Girimaya	19.881	2.942	14,80
4.	Pangkalbalam	21.338	3.738	17,52
5.	Gabek	24.719	3.010	12,18
6.	Taman Sari	22.159	3.396	15,33
7.	Gerunggang	34.426	4.926	14,31
Jumlah		196.202	30.019	15,30

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang dan BAPPEDA, 2016

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu di Kecamatan Pangkalbalam sebesar 17,52 persen dimana masyarakat di kecamatan tersebut bertempat tinggal di wilayah pesisir. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Kecamatan Pangkalbalam berprofesi sebagai nelayan. Sehingga masyarakat tersebut cenderung memiliki pendapatan yang rendah. Dengan demikian, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin di daerah tersebut relatif terbilang banyak.

Kecamatan Pangkalbalam juga memiliki beberapa kelurahan yakni, Kelurahan Rejosari, Ketapang, Ampui, Pasir Garam, dan Lontong Pancur. Jumlah penduduk miskin di setiap kelurahan juga berbeda-beda. Jumlah penduduk miskin Kecamatan Pangkalbalam dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Per Kelurahan di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2015

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Persentase (%)
1.	Rejosari	704	18,83
2.	Ketapang	1358	36,33
3.	Ampui	735	19,66
4.	Pasir Garam	351	9,40
5.	Lontong Pancur	590	15,78
	Jumlah	3.738	100

Sumber : BAPPEDA, 2016

Berdasarkan Tabel 3, jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu di Kelurahan Ketapang sebanyak 1.358 orang atau 36,33 persen. Kelurahan Ketapang merupakan wilayah perbatasan perkotaan dengan pesisir, dimana derasnya arus migran yang masuk memberi dampak terhadap semakin banyaknya penduduk dalam kategori miskin. Salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh para migran di Kelurahan Ketapang adalah nelayan. Mereka memanfaatkan potensi laut yang melimpah di daerah tersebut. Ini juga membuktikan bahwa jumlah nelayan di Kelurahan Ketapang yang terbanyak di Kota Pangkalpinang. Adapun jumlah nelayan di daerah pesisir Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Nelayan Daerah Pesisir Kota Pangkalpinang Tahun 2015

Nama Kelurahan	Nama Kecamatan	Jumlah Nelayan (Orang)
Lontong Pancur	Pangkalbalam	76
Ampui	Pangkalbalam	15
Ketapang	Pangkalbalam	103
Air Itam	Bukit Intan	79
Pasir Putih	Bukit Intan	10
Temberan	Bukit Intan	11
Sinar Bulan	Bukit Intan	11
Opas Indah	Taman Sari	32
Rawa Bangun	Taman Sari	10
Sriwijaya	Girimaya	10
Parit Lalang	Rangkui	10
Selindung Lama	Gabek	10

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, 2016

Berdasarkan Tabel 4, jumlah nelayan daerah pesisir Kota Pangkalpinang yang paling banyak adalah pada Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam

dengan jumlah 103 orang. Banyaknya nelayan di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam disebabkan daerah tersebut merupakan potensi wilayah perbatasan dengan pesisir, maka penduduk yang hidup di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam sebagian besar hidup sebagai nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan dipilih karena sesuai dengan keterampilan masyarakat setempat, sementara sumber daya yang tersedia hanya laut beserta isinya yang mempunyai nilai ekonomis.

Menurut Kusnadi (2009), karakteristik masyarakat pesisir terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah, struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Selain itu, risiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

Nelayan tradisional boleh dikatakan kelompok masyarakat pesisir paling menderita, padahal mereka penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Banyak studi yang telah membuktikan nelayan tradisional umumnya lebih miskin daripada keluarga petani, pengrajin dan pekerja sektor informal (Kusnadi, 2009). Kompleksitas persoalan nelayan saat ini berdampak pada perekonomian mereka yang semakin menurun. Sehingga, menyebabkan kemiskinan dikalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Padahal, nelayan adalah salah satu mata pencaharian utama guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi anggota keluarga. Banyaknya permasalahan kemiskinan yang menimpa nelayan, membuat hidup mereka pasang surut. Tingkat pendidikan yang rendah juga mempersulit nelayan untuk memilih dan memperoleh pekerjaan lain. Kemiskinan nelayan akan semakin berkembang, jika kebijakan pembangunan perikanan tidak memihak kepada nelayan tradisional, yang semakin mengakibatkan mereka tidak bisa meningkatkan hasil produksi penangkapan ikan. Kemiskinan nelayan dipicu dengan rendahnya pendapatan yang diterima oleh nelayan dari hasil menangkap ikan.

Menurut Soekanto (2010), tingkat sosial ekonomi merupakan gambaran kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh faktor sosial seperti tingkat pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan umur sedangkan faktor ekonomi ada pendapatan, jenis rumah tinggal, jenis pekerjaan, modal dan kekayaan yang dimiliki. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Ketapang yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang akan memberikan dampak negatif yang harus cepat ditanggapi. Untuk itu perlu dilakukan pengujian mengenai faktor sosial ekonomi apa saja berpengaruh terhadap kemiskinan yang ada di Kelurahan Ketapang.

Menurut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (2013), indikator rumah tangga miskin dapat dilihat luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m persegi per orang dan terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan, sedangkan jenis dindingnya terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester. Rumah tangga sangat miskin juga tidak memiliki fasilitas buang air besar, penerangan tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari air sumur atau mata air tidak terlindungi, bahan bakar dari kayu bakar atau minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging, susu dan ayam satu kali dalam seminggu, hanya membeli satu setel pakaian dalam setahun, sanggup makan sebanyak satu atau dua kali sehari, tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas, pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan, pendidikan kepala rumah tangga tidak sekolah atau tamat SD, dan tidak memiliki tabungan dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor, emas, ternak dan barang modal lainnya. Berdasarkan indikator tersebut pemerintah telah menjalankan beberapa program dalam membantu penanggulangan kemiskinan, tetapi itu hanya memberikan dampak penghidupan sementara karena masyarakat masih kurang dalam hal pengetahuan yang dimiliki. Pemerintah secara terus-menerus harus memberikan pengarahan kepada nelayan secara langsung maupun tidak langsung melalui penyuluhan dan pelatihan serta melalui media massa yang telah menjangkau masyarakat. Penyuluhan dan pelatihan bagi nelayan akan dapat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan yang pada akhirnya akan menambah kualitas dan kuantitas produksinya. Agar dapat membangun

kesejahteraan penduduk di Kelurahan Ketapang maka masalah kemiskinan ini perlu dikaji kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka penulis menguraikan rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kemiskinan masyarakat nelayan Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam?
2. Adakah keterkaitan program pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat nelayan Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kemiskinan masyarakat nelayan Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam
2. Menganalisis keterkaitan program pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat nelayan Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya hasil penelitian tentang kemiskinan masyarakat pesisir di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam, maka hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada penduduk miskin supaya mampu mengatasi problematika kemiskinan didaerah tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa jurusan Agribisnis maupun pembaca lainnya.